
TNI MARITIME DIPLOMACY TO MAINTAIN REGIONAL SECURITY STABILITY IN THE FRAMEWORK OF MAINTAINING STATE SOVEREIGNTY

Oleh

Irwan Shobirin¹, Surya Wiranto², Aris Sarjito³, Priyanto⁴, Buddy Suseto⁵, Lukman Yudho Prakoso⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Email: ⁶lukman.prakoso@idu.ac.id

Article History:

Received: 17-01-2023

Revised: 24-01-2023

Accepted: 09-02-2023

Keywords:

Maritime Diplomacy,
TNI, Security Stability,
State Sovereignty.

Abstract: *Indonesian maritime diplomacy is the implementation of foreign policy that is not only related to various maritime aspects at the bilateral, regional and global levels but also uses maritime assets, both civil and military to fulfill Indonesia's national interests in accordance with the provisions of national law and international law. The use of military assets in Indonesian maritime diplomacy is carried out by the Indonesian Navy as one of the main components of national defense which besides having duties in the field of defense and security at sea, also carries out naval diplomacy duties in order to support foreign policy policies set by the government. The objectives of this study are (1) to analyze the cooperative maritime diplomacy of the TNI in order to maintain regional security stability in order to maintain state sovereignty; (2) Analyzing the TNI's persuasive maritime diplomacy in order to maintain regional security stability in order to maintain state sovereignty; (3) Analyze the TNI's coercive maritime diplomacy in order to maintain regional security stability in order to maintain state sovereignty. This study used descriptive qualitative method. The results of this study are (1) The facilities and infrastructure that are owned are still limited, Pusinfomar TNI as the TNI's Balakpus Puspa which is still young is facing a long challenge to become a maritime security data center at the national and international level in supporting the TNI's cooperative maritime diplomacy tasks. Awareness of the importance of maritime information data has not grown nationally so that maritime data has not been properly managed between agencies and Ministries/Agencies and there has not been an exchange of information with regional countries in supporting the TNI's maritime diplomacy tasks through information exchange cooperation with domestic maritime data centers and regional countries Indo-Pacific; (2) The implementation of TNI's persuasive maritime diplomacy in the form of sea security training courses has not been carried out with all regional countries, especially with Vietnam and China, it is necessary to carry out training sessions with the two countries*

as a form of cooperative maritime diplomacy by using sea power assets in peacetime and building CBM in accordance with their respective national interests as well as to show Indonesia's role as the largest country and founder of ASEAN; (3) The bilateral and multilateral Patkor has not yet been fully implemented as a form of coercive maritime diplomacy between the TNI and neighboring countries in the face of the vastness of Indonesia's sea boundaries and the strategic bangling situation in the Indo-Pacific region, especially in the SCS region where ZEEI LNU borders with ZEE Vietnam and Malaysia

PENDAHULUAN

Undang-Undang No 17 tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS 1982, Dengan diakuinya Indonesia sebagai negara kepulauan dengan dikeluarkannya Konvensi Hukum Laut oleh PBB (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) pada 10 Desember 1982. wilayah yurisdiksi nasional Indonesia bertambah semakin luas. Kepulauan Indonesia yang sebelumnya terpisah-pisahkan oleh lautan bebas yang berada diantaranya telah menjadi satu kesatuan yang utuh dengan disepakatinya rezim perairan kepulauan yang merupakan bagian wilayah laut yang berada diantara pulau-pulau Indonesia (Suhirwan L. Y., 2018). Berdasarkan Konvensi ini, sebagai negara kepulauan, selain memiliki hak atas wilayah Laut Teritorial selebar 12 Nm dari *base line* juga ditambah dengan Zona Tambahan sejauh 24 Nm dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 Nm serta Lintas Kontinen sejauh maksimal 350 Nm. Pertambahan wilayah laut yang demikian luas ini menjadikan Indonesia berbatasan laut dengan 10 negara yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Philipina, Vietnam, PNG, Palau, Timor Leste dan Australia (Prakoso., 2018). Perbatasan laut ini menjadikan Indonesia memiliki banyak kepentingan nasional dengan negara-negara tetangga tersebut apalagi belum semua batas wilayah laut ini telah tuntas kesepakatannya (Suhirwan L. Y., 2020).

Diantara persoalan perbatasan laut Indonesia dengan negara tetangga yang belum tuntas adalah di Laut Natuna Utara (LNU) yaitu antara Indonesia dengan Malaysia dan Vietnam. Terdapat dua persoalan batas wilayah laut yang belum disepakati di wilayah tersebut yaitu yang pertama batas wilayah Laut Teritorial antara Indonesia dengan Malaysia di Tanjung Datu dan batas wilayah ZEE antara Indonesia dengan kedua negara. Sedangkan untuk batas Landas Kontinen (LK) telah disepakati oleh Indonesia dengan kedua negara tersebut (Kurniawan Cecep, 2020).

Persoalan batas wilayah yang menyangkut kedaulatan ini menjadi semakin rumit dengan adanya klaim sepihak China atas Laut China Selatan (LCS), yang mana klaim tersebut sebagiannya mencakup wilayah LNU di dalamnya. Persoalan perbatasan laut ZEEI di LNU serta klaim sepihak China atas LCS berimbas pada seringnya terjadi kegiatan penangkapan ikan secara ilegal oleh nelayan-nelayan Vietnam dan China di LNU (Lukman Yudho Prakoso, 2021).

Untuk mengamankan kedaulatan negara, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla) telah menggelar kekuatan laut untuk melaksanakan operasi dan patroli pengamanan perbatasan laut khususnya di ZEEI LNU terhadap kegiatan ilegal berupa pelanggaran kedaulatan dan pelanggaran hukum oleh kapal-

kapal asing di wilayah tersebut. Dalam pelaksanaan operasi dan patroli pengamanan laut ini seringkali terjadi insiden antara unsur Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) TNI Angkatan Laut dan Kapal Negara (KN) Bakamla dengan kapal perang dan kapal pemerintah (*coast guard* dan kapal pengawas perikanan) dari China dan Vietnam yang mengawal kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan mereka di ZEEI LNU yang mereka anggap sebagai bagian dari wilayahnya (Palupi, et al., 2021).

Hal ini tentunya sangat rawan terhadap situasi keamanan laut antara Indonesia dengan negara-negara lain yang memiliki kepentingan di wilayah tersebut. Untuk mencegah terjadinya konflik yang lebih besar terhadap persoalan tersebut, maka diperlukan upaya-upaya untuk melindungi kedaulatan wilayah yurisdiksi Indonesia dengan tetap menjaga stabilitas keamanan wilayah tersebut khususnya melalui upaya diplomasi maritim (Rachmad, Zaini, Bangun, Prakoso, & Sianturi, 2021).

Perpres Nomor 16 Tahun 2017, Diplomasi maritim Indonesia merupakan pelaksanaan politik luar negeri yang tidak hanya terkait dengan berbagai aspek kelautan pada tingkat bilateral, regional, dan global tetapi juga yang menggunakan aset kelautan, baik sipil maupun militer untuk memenuhi kepentingan nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional (*rules based approach*). Diplomasi maritim ini merupakan salah satu dari tujuh pilar kebijakan Poros Maritim Dunia yang disampaikan pertama kali oleh Presiden RI Joko Widodo pada *East Asia Summit* (EAS) ke-9 pada November 2014 di Myanmar. Perpres Nomor 16 Tahun 2017, Kebijakan Poros Maritim Dunia sebagai Kebijakan Kelautan Indonesia yang merupakan pengejawantahan geostrategis Indonesia yang berangkat dari upaya pemanfaatan aset-aset kelautan Indonesia secara ekonomis dan strategis. Poros Maritim Dunia merupakan penegasan bagi Indonesia untuk menjadi sebuah negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia (Prasetyo, Prakoso, & Sianturi, 2021).

Penggunaan aset militer dalam diplomasi maritim, Geoffrey Till menyebutkan diplomasi dengan menggunakan kekuatan angkatan laut (*Naval Diplomacy*) sebagai bagian dari diplomasi maritim yang dilakukan dengan sebagai unjuk kekuatan (*naval present*) melalui tindakan *coersive*, *picture building* dan *coalition building* (Till, 2009). Pada Pasal 9 UU No. 34/2004, Penggunaan aset militer dalam diplomasi maritim Indonesia dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut sebagai salah satu komponen utama pertahanan negara yang selain memiliki tugas di bidang pertahanan dan keamanan di laut, juga melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah (Sartono, Prakoso, & Sianturi Dohar, 2021).

Selain melaksanakan diplomasi maritim koersif berupa operasi pengamanan perbatasan ZEEI LNU, TNI Angkatan Laut juga telah mengirimkan personel untuk melaksanakan kegiatan pertukaran informasi, pendidikan, seminar dan *workshop* di Malaysia, Vietnam dan China sebagai bentuk diplomasi maritim kooperatif. Dalam pelaksanaan diplomasi persuasif, TNI Angkatan Laut telah melaksanakan kegiatan latihan bersama dan *port visit*, untuk membangun *confidence building measure* (CBM). Meskipun langkah-langkah diplomasi maritim TNI telah dilaksanakan, namun masih terlihat adanya berbagai pelanggaran dan kegiatan ilegal di ZEEI LNU oleh kapal-kapal negara asing.

Hal ini mengindikasikan bahwa ada permasalahan yang perlu dicarikan pemecahannya untuk mencapai keberhasilan tujuan dalam pelaksanaan diplomasi maritim TNI dalam

menjaga stabilitas keamanan kawasan dan menjaga kedaulatan negara (Ali, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif atau *naturalistic* karena melakukan pada kondisi yang alamiah. Dalam proses penelitian, alur yang perlu dilakukan peneliti sebagai pedoman penelitian yaitu merumuskan masalah, mengumpulkan data, memeriksa keabsahan data, menganalisis data dan menyimpulkan hasil penelitian untuk menjawab dan mengatasi permasalahan. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Mabes TNI dan Mabesal. Waktu Penelitian dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober sampai 19 Desember 2022.

Subjek dan Objek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah Kepala Pusat Kerjasama Internasional TNI, Kepala Pusat Informasi Maritim TNI, Kepala Dinas Operasi dan Latihan TNI AL, Paban Ban V Kerkamtas Sops Mabes TNI, Kasubditops Dinas Operasi dan Latihan TNI AL, Kasubditlat Dinas Operasi dan Latihan TNI AL, Kabid Pusat Informasi Maritim TNI, Pabandya Ban V Kerkamtas Sops Mabes TNI, Kasubbid Pusat Informasi Maritim TNI.

Objek penelitian dalam penelitian ini merupakan keterangan-keterangan yang didapat dari subjek penelitian yang berkaitan dengan Diplomasi maritim TNI dengan negara kawasan guna menjaga stabilitas keamanan maritim dalam rangka melindungi kepentingan nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diplomasi Maritim kooperatif TNI guna menjaga stabilitas keamanan kawasan dalam rangka Menjaga Kedaulatan Negara

Pelaksanaan kerjasama pertukaran informasi situasi keamanan maritim telah lama dilaksanakan oleh TNI sebagai bagian dari diplomasi maritim kooperatif (Kusuma, 2021). Sesuai data yang didapat dari Pusat Kerjasama Internasional (Puskersin) TNI, TNI Angkatan Laut telah menempatkan *International Liaison Officer (ILO)* di *Information Fusion Center (IFC)* Singapura sejak tahun 2011 hingga sekarang (Puskersin TNI, 2022). Para ILO tersebut mengirimkan laporan informasi keamanan maritim kepada Mabesal melalui Puskodal TNI AL baik yang bersifat laporan rutin maupun laporan insidental/khusus.

Pada 6 Januari 2020, Mabes TNI telah membentuk Pusat Informasi Maritim TNI (Pusinfomar TNI) sebagai Badan Pelaksana Pusat (Balakpus) Mabes TNI yang berkedudukan dan bertanggung jawab langsung kepada Panglima TNI dengan tugas memelihara dan meningkatkan keamanan maritim melalui komunikasi, koordinasi dan kolaborasi bersama di bidang pengumpulan, analisa penyediaan dan pertukaran informasi antar pusat operasi maupun pusat informasi maritim Indonesia dan internasional untuk meningkatkan stabilitas keamanan maritim Indonesia dengan kemampuan Terintegrasi dengan pusat informasi stakeholder lainnya (TNI, Kemenko Maritim, Kemenhubla, KKP, BMKG, BNPB, Basarnas, dan lainnya) dan dengan *information center* negara lainnya (Harris A. L., 2021). Hingga saat ini, sistem *dashboard* (pengolah data) Pusinfomar TNI belum terjalin secara sistematis dengan pusat informasi maritim K/L yang ada di dalam negeri maupun LN karena sistem yang dimiliki belum *interoperability* dengan sistem milik K/L maupun *fusion center* negara lain

sehingga belum dapat melaksanakan *update info* secara *real time*.

Data informasi keamanan maritim yang ada di Pusinfomar TNI saat ini diperoleh dari pengolahan data yang berasal dari sistem *dashboard* milik sendiri, data dari luar (dari K/L) diperoleh secara manual/sesuai permintaan, demikian juga data dari ILO kecuali dari ILO IFC yang secara rutin mengirimkan data laporan kepada Pusinfomar TNI (Hermawan, 2021).

Maka Dapat disimpulkan bahwa: Belum terwujudnya pemanfaatan Pusinfomar TNI secara optimal sebagai pusat data keamanan maritim pada tataran nasional maupun internasional dalam mendukung tugas diplomasi maritim kooperatif TNI.

Termanfaatkannya Pusinfomar TNI sebagai pusat data keamanan maritim pada tataran nasional maupun internasional dan pentingnya kerjasama pertukaran informasi dengan negara kawasan dalam mendukung tugas diplomasi maritim kooperatif TNI negara kawasan Indo-Pasifik guna menjaga stabilitas keamanan maritim kawasan dan menjaga kedaulatan kedaulatan wilayah laut Indonesia, tercapainya kesejahteraan masyarakat Indonesia, terwujudnya stabilitas kawasan yang berbasis aturan-aturan hukum internasional dan penguatan kapasitas nasional untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Kelautan Indonesia (Prasetyo K. A., 2021).

Diplomasi Maritim persuasif TNI guna menjaga stabilitas keamanan kawasan dalam rangka Menjaga Kedaulatan Negara

Kegiatan latihan bersama bilateral maupun multilateral khususnya terkait keamanan maritim telah lama dilaksanakan oleh TNI baik berupa Latma ataupun Latgabma dengan negara-negara kawasan Indo-Pasifik (Sartono L. Y., 2021). Dari pelaksanaan kegiatan Latma/Latgabma yang terkait keamanan maritim sebagaimana tergambar di atas, dapat dilihat bahwa kegiatan tersebut bukan hanya dilaksanakan dengan negara-negara yang berbatasan laut dengan Indonesia namun juga dilaksanakan dengan negara-negara kawasan Indo-Pasifik yang memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas keamanan maritim di kawasan tersebut (Listiyono Y. L., 2021). Dalam prakteknya, kegiatan Latma/Latgabma yang dilaksanakan tersebut dapat mencakup tujuan untuk meningkatkan kualitas, profesionalisme dan kerja sama keamanan maritim secara umum maupun khusus misalnya latihan penanganan terorisme di laut, pembajakan dan perompakan. Latma/Latgabma merupakan implementasi hubungan bilateral/multilateral Indonesia dengan negara-negara kawasan dalam bidang pertahanan dan keamanan maritim dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas, profesionalisme dan kerja sama antar negara sehingga membawa pengaruh dalam rangka memperkuat hubungan negara untuk meningkatkan CBM yang merupakan bagian dari diplomasi maritim TNI.

Dengan adanya banglingstra di Kawasan Indo-Pasifik khususnya LCS juga terlihat memberi pengaruh terhadap kegiatan Latma Multilateral yang melibatkan ASEAN dengan AS sebagai negara diluar ASEAN namun berkepentingan terhadap keamanan maritim di kawasan tersebut, Latma Multilateral ASEAN dengan China serta adanya Latma Multilateral ASEAN dengan Rusia. Di wilayah LNU, Indonesia memiliki batas maritim Zona Landas Kontinen(ZLK) dengan Vietnam yang telah disepakati dan ZEE yang mana belum ada kesepakatan final tentang garis batasnya sehingga sering terjadi pelanggaran IUU *fishing* yang dilakukan KIA Vietnam di ZEEI yang ditetapkan sepihak oleh Indonesia di LNU berdasarkan aturan penetapan garis batas laut negara kepulauan dalam UNCLOS 1982. Hal ini juga terjadi dengan KIA China yang sering melakukan pelanggaran IUU *fishing* di LNU akibat klaim sepihak berupa NDL di LCS. belum adanya kegiatan Latma dengan terkait

keamanan laut dengan Vietnam dan China sebagai bagian dari diplomasi maritim TNI dalam meningkatkan CBM dengan kedua negara tersebut. Maka Dapat disimpulkan bahwa: Belum tercapainya pelaksanaan Latma keamanan laut yang optimal dengan negara kawasan Indo-Pasifik khususnya LCS untuk mewujudkan CBM dan keamanan maritim di kawasan dalam mendukung tugas diplomasi maritim persuasif TNI (Hermawan T, 2020).

Terlaksananya latihan bersama keamanan laut secara bilateral dengan Vietnam dan China dihadapkan dengan banglingstra global maupun regional di kawasan Indo-Pasifik khususnya wilayah LNU dan LCS sebagai negara-negara yang memiliki kepentingan keamanan maritim di wilayah tersebut sebagai bentuk diplomasi maritim persuasif dengan menggunakan aset kekuatan laut di masa damai serta membangun CBM dengan kedua negara tersebut sesuai dengan kepentingan nasional masing-masing, serta untuk mencegah terjadinya konflik terbuka yang akan mengganggu stabilitas keamanan maritim di kawasan yang akan mengganggu kepentingan nasional Indonesia. Kerjasama latihan bersama keamanan laut ini sekaligus untuk menunjukkan peran Indonesia sebagai negara terbesar dan pendiri ASEAN dan anggota negara-negara non blok dengan politik bebas aktif memiliki kemampuan untuk memimpin dalam menciptakan perdamaian dan menjaga stabilitas keamanan kawasan dan global yang berbasiskan aturan-aturan hukum internasional (Kusuma E. L., 2021).

Diplomasi Maritim koersif TNI guna menjaga stabilitas keamanan kawasan dalam rangka Menjaga Kedaulatan Negara

Mengingat kebijakan politik LN Indonesia bebas aktif sehingga Indonesia tidak memiliki hubungan Pakta Pertahanan dengan negara manapun maka kerjasama operasi keamanan perbatasan laut dilaksanakan tidak dalam bentuk operasi gabungan bersama (Opsgabma) melainkan dalam bentuk *coordinated patrol* (CORPAT) atau Patroli Terkoordinasi (Patkor) yaitu patroli yang dilaksanakan secara bersama-sama di wilayah masing-masing dalam waktu yang terjadwal dan terkoordinasi. Patkor yang telah dilaksanakan sebagai bagian dari diplomasi maritim TNI selama ini (Suhirwan L. Y., 2019).

Pelaksanaan kegiatan Patkor telah dilaksanakan di wilayah perbatasan laut Indonesia dengan negara-negara tetangga khususnya di wilayah perbatasan laut yang dianggap rawan terhadap gangguan keamanan maritim yaitu di Laut Andaman (Indindo), Selat Malaka (Malindo, Optima dan MSP), Selat Singapura (Indosin), Laut Sulawesi (Philindo dan Indomalphi) dan Laut Arafuru (Ausindo) kecuali di LNU. Menghambatnya situasi di LCS antara China dan AS serta maraknya kejadian pelanggaran *fishing ground* kapal ikan asing (KIA) yang menangkap ikan di ZEEI LNU semestinya dapat menjadi inisiatif pelaksanaan Patkor antara Indonesia dengan Vietnam dan Malaysia yang berbatasan Laut (ZEE) di wilayah tersebut.

Maka Dapat disimpulkan bahwa: Belum tercapainya pelaksanaan Patkor bilateral maupun multilateral yang optimal dihadapkan luasnya garis batas laut Indonesia dengan negara-negara sekitar dan banglingstra di kawasan Indo-Pasifik khususnya wilayah LNU dan LCS dalam mendukung tugas diplomasi maritim kooperatif TNI.

Terlaksananya kerjasama operasi keamanan laut dengan negara kawasan secara bilateral maupun multilateral melalui pelaksanaan Patkor dengan Vietnam dan Malaysia di ZEEI LNU dan LCS sebagai bagian dari kegiatan diplomasi maritim koersif TNI untuk menunjukkan kewibawaan kedaulatan Indonesia di mata dunia internasional dan membangun CBM dengan negara-negara kawasan khususnya ASEAN serta untuk meredam

ketegangan dengan adanya ikut campur negara-negara diluar kawasan dengan segala kepentingannya yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan di kawasan Indo-Pasifik khususnya wilayah LCS. Pelaksanaan gelar Patkor tersebut diharapkan dapat meningkatkan stabilitas keamanan maritim di kawasan dan mengurangi pelanggaran dan ketegangan di LCS diantaranya permasalahan *fishing ground* KIA dan pelanggaran wilayah di LNU serta permasalahan lainnya yang dapat mengganggu stabilitas keamanan maritim kawasan (Lukman Yudho Prakoso D. A., 2021).

KESIMPULAN

1. Mengingat sarana dan prasarana yang dimiliki masih terbatas, Pusinfomar TNI sebagai Balakpus TNI yang berusia belia masih menghadapi tantangan panjang untuk dapat menjadi pusat data keamanan maritim pada tataran nasional maupun internasional dalam mendukung tugas diplomasi maritim kooperatif TNI. Belum tumbuhnya kesadaran akan pentingnya data informasi maritim secara nasional sehingga data maritim belum terkelola dengan baik antar instansi dan K/L dan belum terjalin pertukaran informasi dengan negara kawasan dalam mendukung tugas diplomasi maritim TNI melalui kerjasama pertukaran informasi dengan pusat data maritim dalam negeri dan negara kawasan Indo-Pasifik. Hal ini dapat diawali dengan kerjasama pertukaran informasi maritim dengan pusat data informasi maritim di lingkungan TNI dan *stake holder* terkait bidang kelautan/maritim di dalam negeri dan dilanjutkan dengan pertukaran informasi maritim dengan Angkatan Laut, *coast guard* dan instansi/agensi keamanan maritim LN serta melaksanakan simposium, *workshop* ataupun pelatihan terkait pertukaran informasi maritim di level nasional maupun internasional bersama pihak-pihak terkait sebagai upaya menumbuhkan *maritime domain awarenes*. Inisiatif kerjasama pertukaran informasi dapat diawali melalui pertemuan tingkat ASEAN dan non ASEAN dalam forum ADMM, ADMM Plus, HACGAM maupun pertemuan tingkat bilateral sesuai dengan program kerja Kemenlu, Kemhan, Mabes TNI dan Mabes Matra dalam rangka tercapainya tujuan menjaga stabilitas keamanan kawasan dan untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah laut Indonesia, tercapainya kesejahteraan masyarakat Indonesia, terwujudnya stabilitas kawasan yang berbasis aturan-aturan hukum internasional dan penguatan kapasitas nasional untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Kelautan Indonesia.
2. Pelaksanaan diplomasi maritim persuasif TNI berupa Latma keamanan laut belum dilaksanakan dengan semua negara kawasan khususnya dengan negara Vietnam dan China. Mengingat situasi banglingstra global maupun regional di kawasan Indo-Pasifik khususnya wilayah LCS sebagai negara-negara yang memiliki kepentingan keamanan maritim di wilayah tersebut maka perlu dilaksanakan Latma dengan kedua negara tersebut sebagai bentuk diplomasi maritim kooperatif dengan menggunakan aset kekuatan laut di masa damai serta membangun CBM sesuai dengan kepentingan nasional masing-masing sekaligus untuk menunjukkan peran Indonesia sebagai negara terbesar dan pendiri ASEAN dan anggota negara-negara non blok dengan politik bebas aktif memiliki kemampuan untuk memimpin dalam menciptakan perdamaian dan menjaga stabilitas keamanan kawasan dan global yang berbasiskan aturan-aturan hukum internasional. Inisiatif pelaksanaan Latma dapat menggunakan

sarana pertemuan tingkat menteri Kemenlu untuk membahas persoalan penyelesaian batas-batas maritim dan Kemenhan untuk membahas kerjasama bidang pertahanan dan keamanan dilanjutkan dengan pertemuan HLC para panglima / kepala angkatan bersenjata dan kepala staf matra untuk membahas pelaksanaan kerjasama bidang latihan keamanan laut dan pertemuan tingkat working group untuk membahas perencanaan pelaksanaan latihan bersama melalui kerjasama ASEAN dan non ASEAN maupun pertemuan tingkat bilateral sesuai dengan program kerja Kemenlu, Kemhan, Mabes TNI dan Mabes Matra sehingga tercapainya tujuan kerjasama latihan keamanan laut untuk mencegah terjadinya konflik terbuka yang akan mengganggu stabilitas keamanan maritim di kawasan yang akan mengganggu kepentingan nasional Indonesia; dan

3. Belum dilaksanakannya Patkor bilateral maupun multilateral secara menyeluruh sebagai bentuk diplomasi maritim koersif TNI dengan negara-negara sekitar dihadapkan luasnya garis batas laut Indonesia dan situasi banglingstra di kawasan Indo-Pasifik khususnya di wilayah LCS dimana ZEEI LNU berbatasan dengan ZEE Vietnam dan Malaysia. Dengan masih adanya persoalan batas maritim berupa ZEE yang belum tuntas antara Indonesia, Malaysia dan Vietnam di LNU, maka untuk itu perlu dilaksanakan Patkor bilateral maupun multilateral dengan Vietnam dan Malaysia di ZEE LNU dan LCS sebagai bagian dari kegiatan diplomasi maritim kooperatif untuk menunjukkan kewibawaan kedaulatan Indonesia di mata dunia internasional yang dapat menjadi pemimpin dalam usaha-usaha perdamaian dan keamanan dan membangun CBM dengan negara-negara kawasan khususnya ASEAN serta untuk meredam ketegangan dengan adanya ikut campur negara-negara diluar kawasan dengan segala kepentingannya yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan di kawasan Indo-Pasifik khususnya wilayah LCS. Inisiatif pelaksanaan Patkor ini dapat dengan menggunakan sarana kerjasama ASEAN dalam forum ADMM maupun pertemuan tingkat bilateral sesuai dengan program kerja Kemenlu, Kemhan, Mabes TNI dan Mabes Matra demi tercapainya tujuan kerjasama operasi keamanan laut untuk mencegah pelanggaran hukum dan penyalahgunaan lintas laut di wilayah ZEE LNU dan LCS serta menjaga stabilitas keamanan maritim kawasan.

REKOMENDASI

1. Pemerintah agar menyusun peraturan tentang pengelolaan dan pemanfaatan data informasi maritim nasional melalui kerjasama/sinergi antar instansi dan K/L terkait bidang maritim yang memiliki Pusat Informasi Maritim serta kerjasama pertukaran informasi maritim dengan negara kawasan dengan mewujudkan pemanfaatan Pusinfomar TNI secara optimal sebagai sarana diplomasi Maritim kooperatif TNI dengan negara kawasan guna menjaga stabilitas keamanan maritim dan melindungi kepentingan nasional Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah laut Indonesia, tercapainya kesejahteraan masyarakat Indonesia, terwujudnya stabilitas kawasan yang berbasis aturan-aturan hukum internasional dan penguatan kapasitas nasional sebagai bentuk diplomasi kooperatif untuk membangun CBM dengan negara kawasan guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Kelautan Indonesia.

2. Pemerintah agar segera menuntaskan persoalan batas maritim ZEE di LNU bersama dengan Vietnam dan Malaysia dengan berpedoman pada pendekatan berbasis aturan (*rule based approached*) dengan memprioritaskan tatanan bilateral, kawasan dan global yang berbasis pada aturan dan kebiasaan internasional yang telah disepakati bersama khususnya dalam hal ini adalah UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia, Malaysia dan Vietnam. Pematuhan dan penghormatan terhadap aturan hukum laut internasional tentunya diharapkan akan dapat mewujudkan ketertiban dan stabilitas keamanan kawasan. Pelaksanaan Latma merupakan sebuah bentuk upaya diplomasi maritim persuasif yang dapat dilaksanakan sekaligus penerapan dari salah satu program utama diplomasi maritim yang tertuang dalam Buku Putih Diplomasi Maritim Indonesia yaitu “peningkatan kepemimpinan di dalam berbagai kerjasama di bidang kelautan pada tingkat bilateral, kawasan dan multilateral” dengan menggunakan aset kekuatan laut di masa damai serta membangun CBM dengan kedua negara sesuai dengan kepentingan nasional masing-masing serta untuk mencegah terjadinya konflik terbuka yang akan mengganggu stabilitas keamanan maritim di kawasan yang akan mengganggu kepentingan nasional Indonesia.
3. Perlunya pemerintah menyusun Peraturan tentang Diplomasi Maritim TNI sebagai aplikasi dari Kebijakan Kelautan Indonesia dan dokumen Buku Putih Diplomasi Maritim Indonesia yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sebagai pedoman dalam pelaksanaan diplomasi maritim TNI melalui bentuk diplomasi maritim kooperatif, persuasif maupun koersif yang sinergi dengan K/L terkait dalam menghadapi situasi banglingstra global maupun regional untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia diantaranya melalui pelaksanaan Patkor untuk menjaga wilayah batas maritim Indonesia dengan negara-negara sekitar yang berbatasan laut dengan Indonesia secara terkoordinasi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ali, I. M. (2021). Strategi Pertahanan Laut dalam Menghadapi Ancaman Keamanan maritim di Wilayah Laut Indonesia. *Strategi Pertahanan Laut*, Vol 6 No 1.
- [2] Harris, A. L. (2021). Strategi Pertahanan Laut dalam Rangka Ancaman Keamanan di Alur Laut Kepulauan Indonesia II. *Strategi Pertahanan Laut*, Vol 5 No 1.
- [3] Hermawan T, L. Y. (2020). Strategi Pertahanan Laut dalam Analisa Dampak dan Upaya Pemerintah Mengamankan ALur Laut Kepulauan Indonesia. *Strategi Pertahanan Laut*, 6,3,273-296.
- [4] Hermawan, T. L. (2021). Strategi Pertahanan Laut Indonesia Dalam Analisa Dampak Dan Upaya Pemerintah Mengamankan Alur Laut Kepulauan Indonesia. *Strategi Pertahanan Laut*, Vol 6 No 3.
- [5] Kurniawan, C., Widyarto, S., & Prakoso, L. Y. (2020). Implementasi Struktur Birokrasi Strategi Pertahanan Laut Menghadapi Ancaman di Perairan Provinsi Sulawesi Tenggara. *Strategi Pertahanan Laut*, Vol 4 No 1.
- [6] Kusuma, A. W. (2021). Sinergitas Komando Armada I dan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dalam Strategi Pertahanan Laut Guna Memberantas Kejahatan Lintas Negara di Selat Malaka. *Strategi Pertahanan Laut*, Vol 5 No 2.
- [7] Kusuma, E. L. (2021). Strategi Pertahanan Semesta Menjaga Identitas Nasional Mendukung Indonesia Poros Maritim Dunia. *Strategi Perang Semesta*, 7,2,123-143,.

-
- [8] Listiyono, Y. L. (2021). Strategi Pertahanan Laut dalam Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia untuk Mewujudkan Keamanan Maritim dan Mempertahankan Kedaulatan Indonesia. *Strategi Pertahanan Laut*, Vol 5 No 3.
- [9] Listiyono, Y., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2019). Membangun kekuatan laut indonesia dipandang dari pengawal laut dan deterrence effect indonesia building indonesian sea power based on the indonesian sea guard and deterrent effect. *Strategi Pertahanan Laut*, 5,1,73-84.
- [10] Lukman Yudho Prakoso. (2021). Strategi pertahanan laut menghadapi ancaman di perairan Provinsi Sulawesi Tenggara. *Proceedings KKDN 2020 Universitas Pertahanan*.
- [11] Lukman Yudho Prakoso, D. A. (2021). National Defense Policy by Strengthening Defense Strategy: Study of the Development of a Naval Air Base in Bengkulu. *ITALIENISCH*, 11,2,335-347.
- [12] Palupi, E., Dar, D., Suhardono, E., Sianturi, D., Prakoso, L. Y., & Bangun Ernalem. (2021). Sea Defense Strategy Strengthening Through Improving The Readiness of Indonesian Naval Vessel Crew (Study: The Health Office of 1st Fleet Command). *Social and Political Sciences*, Vol 4 No 1.
- [13] Prakoso, L. Y. (2018). Strategi Maritim Penanganan Kejahatan Lintas Negara Di Perbatasan Laut Indonesia Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal Maritim*.
- [14] Prakoso, L. Y. (2021). Sistem Pertahanan Negara Di Laut.
- [15] Prakoso., L. Y. (2018). Strategi Maritim Penanganan Kejahatan Lintas Negara Di Perbatasan Laut Indonesia Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal Maritim, Sekolah Staff dan Komando TNI*.
- [16] Prasetyo, K. A. (2021). Strategi Pertahanan Laut Pemerintah Indonesia Dalam Rangka Menegakan Hukum Pada Alur Laut Kepulauan Indonesia. *Strategi Pertahanan Laut*, Vol 6 No 3.
- [17] Prasetyo, K. A., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2021). Strategi Pertahanan Laut Pemerintah Indonesia dalam Menjaga Keamanan Maritim. *Strategi Pertahanan Laut*, Vol 5 No 1.
- [18] Rachmad, M., Zaini, A., Bangun, E., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2021). Strengthening the Marine Defense Strategy of Lanal Banten Area through Empowerment of the Traffic Separation Scheme in the Sunda Strait. *Social and Political Sciences*, Vol 4 No1.
- [19] Sartono, L. Y. (2021). Perimbangan Kekuatan Laut Indonesia Masa Kini Dihadapkan Dengan Geopolitik Kawasan Asia Pasifik. *Strategi Pertahanan Laut*, Vol 5 No 2.
- [20] Suhirwan, L. Y. (2018). Strategi Pertahanan Dalam Penanganan Kejahatan Lintas Negara Di Perbatasan Laut Manado Sulawesi Utara Tahun 2017. *Membangun Indonesia: Resolusi Konflik Sosial Lintas Prespektif*. Indonesia Qualitative Reseacher Association (IQRA).
- [21] Suhirwan, L. Y. (2020). Indonesian Navy as a Maritime Command Center Sea Defense Strategy, Public Policy Administration Research. *IISTE*.
- [22] Suhirwan, S., & Prakoso, L. Y. (2019). Forum Maritim Kunci Sukses Penanggulangan Ancaman Asimetris di Selat Sunda. *Seminar dan Lokakarya Kualitatif Indonesia*, 13-20.
- [23] Till, G. (2009). *Seapower; a guide for the twentieth-first century, ed. Ke-2*. New York: Routledge.